

PENGUKURAN KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA DENGAN MENGGUNAKAN ANALISIS *VALUE FOR MONEY*

Isnah Mar'atus Sholikhah¹, Novi Khoiriawati²

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung^{1,2}

Email: isnasholikhah@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Desa Pucangsimo berdasarkan konsep pengukuran kinerja sektor publik Value For Money. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus untuk mengukur dan menganalisis hasil pengukuran pada Laporan Realisasi APBDes Desa Pucangsimo tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 yang ditinjau dari aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Data yang digunakan berupa data sekunder berupa Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran 2017 sampai 2021 dan data primer berupa hasil observasi dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yaitu 1) Reduksi Data 2) Penyajian Data 3) Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Desa Pucangsimo tahun 2017 sampai 2021 berada pada kategori ekonomis. Dari segi efisiensi, pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan hasil efisien sedangkan pada tahun 2017, 2020, dan 2021 menunjukkan hasil tidak efisien. Dari segi efektivitas, pada tahun 2017, 2018, dan 2019 menunjukkan hasil efektif sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan hasil cukup efektif. Simpulan dari penelitian ini yaitu adanya inefisiensi dalam pengendalian belanja sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi Desa Pucangsimo untuk menekan kegiatan belanja sekaligus meningkatkan pendapatan asli desa dengan cara menggali serta mengembangkan potensi desa.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan, Pemerintah Desa, Value For Money*

ABSTRACT

This study aims to measure the financial performance of Pucangsimo Village based on the concept of measuring public sector performance Value For Money. The researcher uses a descriptive quantitative approach with the type of case study research to measure and analyze the measurement results in the Pucangsimo Village APBDes Realization Report 2017, 2018, 2019, 2020, and 2021 which are viewed from the economic, efficiency, and effectiveness aspects. The data used are secondary in the form of the APBDes Realization Report for 2017 to 2021 fiscal year and primary data in the form of observations and interviews. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model, namely 1) Data Reduction, 2) Data Presentation, and 3) Conclusion Drawing. The results showed that the financial performance of Pucangsimo Village from 2017 to 2021 was in the economic category. In terms of efficiency, 2018 and 2019 showed efficient results while 2017, 2020, and 2021 showed inefficient results. In terms of effectiveness, 2017, 2018, and

2019 showed effective results, while 2020 and 2021 showed quite effective results. This study provides information related to the existence of inefficiencies in controlling spending so that it can be a consideration for Pucangsimo Village to suppress spending activities while increasing the village original income by exploring and developing village potential.

Keywords: *Financial Performance, Village Government, Value For Money*

PENDAHULUAN

Berkaitan dengan otonomi daerah, Desa menjadi basis dalam pembangunan nasional. Desa merupakan kesatuan warga yang mempunyai hak melakukan pengaturan dan pengurusan kepentingan warga dengan melaksanakan pemerintahan selaras dengan hak tradisional maupun hak asal-usul dan diberi pengakuan dari sistem pemerintahan NKRI (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Upaya mengelola Keuangan Desa menjadi hak dan wewenang pemerintahan desa. Keuangan Desa dikelola dengan disiplin, akuntabel, transparan, serta keikutsertaan atau partisipatif (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018).

Pelaksanaan kewenangan Desa mengacu pada kewenangan maupun hak asal usulnya Desa di danai menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Majid, 2019). Anggaran menjadi hal yang penting untuk memperkirakan kinerja yang diharapkan oleh pemerintah (Nanda & Darwanis, 2016). Pemerintah Desa menganggarkan segala bentuk sumber pendapatan, belanja, dan pembiayaan ke dalam APBDes dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa untuk satu tahun periode. Anggaran yang dikelola pemerintah desa cukup besar karena memiliki beberapa sumber pendapatan antara lain PAD, Dana Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Akhir 2019 terjadi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang memberi dampak pada beragam bidang. Sebagai respon atas dampak ekonomi masyarakat desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang adanya realokasi pemakaian Dana Desa yang diarahkan untuk program SDGs Desa dengan kegiatan memulihkan perekonomian nasional sejalan dengan kewenangan desa, program utama nasional selaras dengan wewenang desa, serta pengadaptasian kebiasaan baru daerah (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, 2020). Peran Dana Desa dalam adaptasi kebiasaan baru agar desa aman dari Covid-19, serta mendukung ekonomi masyarakat miskin melalui bantuan langsung tunai (BLT). Sebelum pandemi Covid-19, penggunaan dana desa guna pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, kegiatan memberdayakan warga, maupun kemasyarakatan (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014).

Meningkatnya kesadaran masyarakat terkait besarnya dana yang dikelola pemerintah desa serta adanya realokasi prioritas Dana Desa menjadi tuntutan agar pemerintah desa memperhatikan kinerja pengelolaan anggaran keuangan desa agar sesuai prioritas, ekonomis, efektif, dan efisien. Organisasi sektor publik seringkali dievaluasi sebagai sumber pemborosan, inefisiensi, korupsi, serta mendatangkan kerugian bagi institusinya (Mardiasmo, 2002). Maka dari itu, anggaran menjadi hal yang penting untuk memperkirakan kinerja yang diharapkan oleh pemerintah (Nanda & Darwanis, 2016). Keuangan Desa wajib dilakukan dengan pengelolaan yang mengacu pada asas akuntabel, transparan, dan disiplin anggaran, kemudian juga partisipatif (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018). Pada sektor publik, cakupan dari akuntabilitas ini yaitu ada akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas kebijakan, akuntabilitas program, maupun akuntabilitas proses (Mahsun, 2013).

Kinerja Keuangan Desa dapat diukur menggunakan metode Analisis Selisih Anggaran, *Balance Scorecard*, dan *Value For Money*. Salah satu cara mencapai tata kelola pemerintahan yang baik adalah penerapan *Value For Money* (Mahdita et al., 2021). *Value For Money* merupakan konsep yang penting karena intinya dari mengukur hasil kerja sektor publik yaitu mengukur efisiensi, ekonomis, dan efektivitasnya (Mahmudi, 2015). Elemen efisiensi dan efektifitas perlu dipakai dengan bersamaan dikarenakan dalam salah satu sisi mungkin implementasinya telah dilaksanakan dengan sederhana dan efektif namun *Output* yang diciptakan tidak tepat sarannya, sementara pada segi lainnya mungkin program dinyatakan berjalan efektif dan tepat sasaran dan tujuan tapi diraih melalui cara yang tidak ekonomis serta efektif (Mahsun, 2013). Kinerja pemerintahan tidak mampu di nilai dari sisi

Outputnya saja, namun perlu memperhatikan sisi *Input*, *Output*, dan *Outcome* secara bersamaan (Mardiasmo, 2002).

Penyerapan anggaran adalah indikator kesuksesan program ataupun kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintahan (Anfujatin, 2016). Program dikatakan mencapai *Cost Effectiveness* ketika program dicapai secara efektif dan efisien (Mahsun, 2013). Efisiensi dapat diukur menggunakan perbandingan antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja (Mahsun, 2013). Sedangkan SiLPA adalah indikator efisiensi yang terbentuk ketika APBDes Surplus dan pembiayaan bersih positif terjadi ketika porsi penerimaan lebih besar dari porsi pembiayaan (Rosmawati, 2021).

Berdasarkan Laporan Realisasi APBDes Desa Pucangsimo pada tahun 2020 dan 2021 secara berturut turut mengalami Defisit yaitu realisasi belanja lebih besar dari pada realisasi pendapatan. Secara umum. Data pada Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Desa Pucangsimo Tahun anggaran 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.
Laporan Realisasi APBDes Desa Pucangsimo tahun anggaran 2017 – 2021

Tahun	TOTAL			
	Pendapatan		Belanja	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
2017	1.520.279.834,05	1.522.356.454,66	1.541.503.810,98	1.537.334.705,74
2018	1.967.640.000,00	1.972.316.926,00	1.973.885.725,85	1.964.684.380,00
2019	2.138.776.000,00	2.140.426.827,00	2.152.654.271,85	2.098.962.400,00
2020	2.599.410.000,00	2.248.312.892,27	2.654.752.698,85	2.293.733.897,06
2021	3.059.954.000,00	3.059.764.156,00	3.069.875.694,06	3.061.287.529,00

Sumber: Pemerintah Desa Pucangsumo, data diolah penulis

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat diuraikan bahwa APBDes Desa Pucangsimo mulai tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2021 anggaran pendapatan dan belanja mengalami kenaikan diikuti dengan realisasinya. Namun pada tahun 2017, 2020, dan 2021 mengalami Defisit Anggaran yaitu realisasi belanja lebih besar dari realisasi pendapatan. Dalam hal ini, defisit anggaran dapat dikaitkan dengan adanya inefisiensi dalam pengelolaan keuangan. Defisit Anggaran berasal dari besarnya belanja barang dan jasa, dan belanja modal (Prihatiningsih et al., 2013). Defisit APBDes Desa Pucangsimo berhasil ditutup

menggunakan SiLPA. Selain itu, pada tahun 2021 PAD pada BUMDes tidak masuk ke rekening desa serta beberapa kegiatan pada tahun 2020 dan 2021 tidak terealisasi. Terkait adanya defisit anggaran, maka Desa Pucangsimo harus mampu menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja agar kinerja keuangannya efisien. Hal ini sejalan dengan arahan pemerintah agar memprioritaskan 3 kebijakan termasuk peningkatan *Value For Money*, penganggaran berbasis *Outcome*, dan mementingkan prioritas (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 Tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, 2018).

Tujuan penelitian ini guna melakukan pendeskripsian hasil pengukuran kinerja finansial pemerintahan Desa pucangsimo yang ditinjau menggunakan konsep *Value For Money* dan hasil akan menggambarkan kinerja keuangan Desa Pucangsimo ditinjau dari segi ekonomis, efisiensi, serta efektivitas yang mencakup pengelolaan anggaran desa dalam kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. *Value For Money* digunakan peneliti terdahulu untuk mengukur kinerja keuangan organisasi sektor publik antara lain (Maryanti & Munandar, 2021), (Bayuwono et al., 2022), (Putri & Susliyanti, 2019), (Seran, 2021), dan (Magfiroh et al., 2021) untuk mengukur kinerja keuangan desa. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa desa tidak efisien dalam mengelola keuangan desa akibat adanya pemborosan pada beberapa sub bidang kegiatan.

KAJIAN TEORI

Kinerja Keuangan

Kinerja yakni *output* yang dihasilkan dari program atau aktivitas yang telah maupun bisa dicapai berkaitan terhadap pemanfaatan dana berdasarkan kualitas dan kuantitas yang memadai. Indikator kinerja mengacu pada PP No. 13 Tahun 2019 terkait pengelolaan keuangan daerah mencakup *Input*, *Output*, dan *Outcome* (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 2019). Kinerja disebut sebagai penggambaran tingkat tercapainya penyelenggaraan program, aktivitas, dan kebijakan guna mewujudkan tujuan, visi dan misi, serta sasaran yang diharapkan (Mahsun, 2013). Dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan gambaran keberhasilan individu atau organisasi sehubungan dengan

pengalokasian anggaran untuk membiayai aktivitas atau kegiatan dengan kualitas dan kuantitas yang terukur guna mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Kinerja mengelola finansial desa bisa ditentukan dicapai ataupun tidak tujuannya dari dana atau finansial daerah (Munti & Fahlevi, 2017). Kinerja keuangan desa dapat dikatakan sebagai kemampuan pemerintah desa dalam mengalokasikan anggaran dalam membiayai segala aktivitas atau kegiatan sebagai rangka pelaksanaan pemerintahan, infrastruktur, dan memberdayakan warga.

Value For Money

Value For Money disebut sebagai penghargaan berkaitan dengan nilai uang (Mahmudi :2015). Hal tersebut bermakna setiap uang harus dialokasikan secara tepat guna. Konsep *Value For Money* terdiri dari elemen ekonomis, efektivitas dan efisiensinya (Mardismo, 2002:4). Elemen *Value For Money* dapat dikatakan bahwa ekonomis menjelaskan terkait masukan, efisiensi menerangkan terkait masukan beserta keluaran, sementara efektivitas menerangkan etrkait keluaran beserta dampaknya. Suatu organisasi mencapai *Value For Money* ketika berhasil mempergunakan biaya *Input* terendah guna meraih *Output* maksimal sebagai rangka meraih tujuannya.

Ekonomi merupakan aktivitas pengadaan barang atau jasa dengan kualitas tertentu dengan harga terbaik (*spending less*). Dengan kata lain, Ekonomi merupakan perbandingan antara *input* sekunder (bahan baku, pegawai, dan infrastuktur) dengan *input* primer yang berupa kas (Mahmudi, 2015). Sedangkan Mahsun (2013) mengatakan tingkat ekonomis pengelolaan keuangan pada organisasi pemerintahan dapat dilihat dari tingkat persentase pencapaian dari perbandingan antara anggaran dengan realisasinya. Apabila sumber daya yang dikeluarkan ada di bawah anggaran berarti terdapat upaya menghemat. Namun, bila melebihi anggarannya berarti ada pemborosan. Pengukuran ekonomis dapat dilakukan dengan membandingkan *Input* dengan *Input Value* yang disebutkan dalam satuan rupiah (Mardiasmo, 2002). Pengukuran Ekonomis dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Ekonomis} = \frac{\text{Target Anggaran Belanja (Input)}}{\text{Realisasi Anggaran Belanja (Input Value Rp)}} \times 100\%$$

Kriteria kinerja pengelolaan keuangan didasarkan atas rasio ekonomis bisa diamati melalui tabel ini:

Tabel 2.
Kriteria Rasio Ekonomis

Presentase Nilai Kinerja	Kriteria
>100%	Ekonomis
85%-100%	Cukup Ekonomis
65%-84%	Kurang Ekonomis
<65%	Tidak Ekonomis

Sumber: Mahmudi (2015:111)

Efisiensi atau berdaya guna berkaitan dengan konsep produktivitas yaitu rasio diantara keluaran mencakup jasa dan produk yang diproduksi dengan masukan ataupun penggunaan sumber dayanya. Mahmudi (2015) mengatakan suatu program atau kegiatan operasional organisasi dinyatakan efisien ketika berhasil mencapai *Output* melalui menggunakan *Input* minimum, atau *Input* tertentu mampu mencapai *Output* maksimum (*spending well*). Efektivitas merupakan hasil dari program dan kebijakan organisasi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Efisiensi pengelolaan keuangan desa dapat diukur menggunakan perbandingan realisasi anggaran belanja dengan realisasi anggaran pendapatan (Mahsun, 2013). Pengukuran Efisiensi dapat dilakukan menggunakan rumus, yakni:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria kinerja pengelolaan keuangan didasarkan atas rasio efisiensi bisa diamati melalui tabel ini.

Tabel 3.
Kriteria Rasio Efisiensi

Presentase Nilai Kinerja	Kriteria
<90%	Sangat Efisien
90%-99%	Efisien
100%	Cukup Efisien
>100%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2015:111)

Efektivitas dapat dikatakan sebagai hubungan antara *Output* dengan tercapainya target yang telah ditentukan atau berdaya guna. Mardiasmo (2002) mengatakan aktivitas operasional suatu organisasi dinyatakan efektif ketika program kebijakan atau kegiatan telah mencapai sasaran akhir (*spending wisely*). Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan organisasi pemerintahan dapat dilihat dari persentase pencapaian dari hasil perbandingan realisasi pendapatan terhadap anggaran pendapatan (Mahsun, 2013). Rasio Efektivitas dapat dilakukan pengukuran menggunakan rumus, yakni:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target anggaran pendapatan}} \times 100\%$$

Kriteria kinerja pengelolaan keuangan berdasarkan rasio efektivitas dapat bisa diamati melalui tabel ini:

Tabel 4.
Kriteria Rasio Efektivitas

Presentase Nilai Kinerja	Kriteria
≥100%	Efektif
85% - 99%	Cukup Efektif
65% - 84%	Kurang Efektif
≤65%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2015:111)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang berjenis penelitian Studi Kasus. Penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis data numerik dengan kontrol variabel. Sedangkan jenis penelitian studi kasus digunakan untuk menjelajahi permasalahan dengan pembatasan terperinci, menentukan data dengan lebih

dalam, serta menyertakan beragam sumber informasinya (Murdiyanto, 2020). Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder berupa Laporan Realisasi APBDes Desa Pucangsimo tahun anggaran 2017 sampai dengan 2021 sedangkan data primer didapatkan melalui teknik wawancara bersama kepala urusan keuangan Desa Pucangsimo. Variabel yang digunakan adalah *Value For Money*.

Teknik analisis data yang digunakan yakni model Miles & Huberman mencakup *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/ verification*. Reduksi data (*data reduction*) digunakan pada proses pemilahan data pada hasil wawancara terkait hasil pengukuran kinerja keuangan Desa Pucangsimo berdasarkan Laporan Realisasi APBDes Desa Pucangsimo tahun anggaran 2017 sampai 2022 menggunakan konsep *Value For Money*. Penyajian Data (*data display*) digunakan untuk menyajikan data menggunakan teks yang sifatnya naratif berdasarkan kategori ekonomis, efisiensi, dan efektivitas setelah dilakukan pengukuran rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi dipakai dalam proses analisis terhadap hasil presentase yang diperoleh dari pengukuran Laporan Realisasi APBDes Desa Pucangsimo Teknik Wawancara untuk mendiskusikan terkait kegiatan pengelolaan anggaran desa serta penjabaran dalam Laporan Realisasi APBDes Desa Pucangsimo pada tahun anggaran 2020 dan 2021.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil pengukuran *Value For money* menggunakan rasio ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pucangsimo pada tahun anggaran 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Kinerja keuangan Desa Pucangsimo pada tahun 2020 dan 2021 ditinjau dari aspek ekonomis

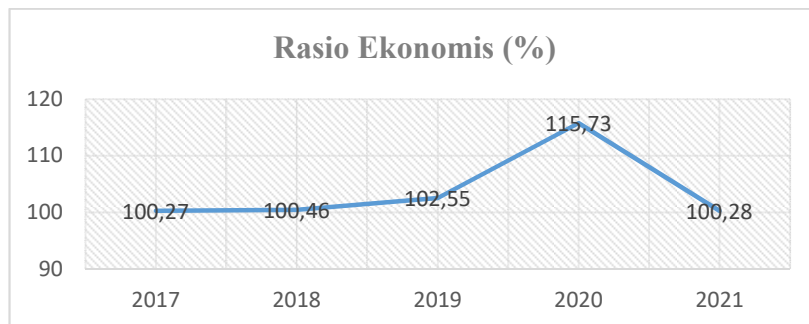
Tabel 5.
Hasil Pengukuran Rasio Ekonomis

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2017	1.541.503.810,98	1.537.334.705,74	100,27	Ekonomis
2018	1.973.885.725,85	1.964.684.380,00	100,46	Ekonomis
2019	2.152.654.271,85	2.098.962.400,00	102,55	Ekonomis
2020	2.654.752.698,85	2.293.733.897,06	115,73	Ekonomis
2021	3.069.875.694,06	3.061.287.529,00	100,28	Ekonomis

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan tabel 1.5 terlihat bahwa kinerja keuangan Desa Pucangsimo ditinjau dari segi ekonomis mulai tahun 2017 sampai 2021 menunjukkan rasio diatas 100%, artinya berada pada kategori Ekonomis. Dimana hasil rasio pada tahun 2017 sebesar 100,27%, tahun 2018 sebesar 100,46%, tahun 2019 sebesar 102,55%, tahun 2020 sebesar 115,73%, dan tahun 2021 sebesar 100,28%.

Jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka hasil perhitungan kinerja keuangan pada APBDes Desa Pucangsimo ditinjau dari segi ekonomis adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Rasio Ekonomis Desa Pucangsimo Tahun 2017-2021

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa persentase kinerja keuangan Desa Pucangsimo mulai tahun 2017 sampai 2020 secara konsisten mengalami kenaikan, namun terjadi penurunan pada tahun 2021. Pada tahun 2021 realisasi belanja Desa Pucangsimo memang meningkat karena selama pandemi *Covid-19* anggaran banyak dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan *Covid-19* yaitu mendukung operasional vaksin, pembelian obat-

obatan pertolongan pertama, penyediaan alat cuci tangan, dan penyediaan kotak obat disetiap rumah warga, selain itu anggaran DD juga dialokasikan untuk penyaluran BLT untuk mendukung perekonomian warga yang terdampak *Covid-19* serta kegiatan pelatihan untuk masyarakat yang diharapkan mereka lebih mandiri khususnya bagi korban PHK (Wawancara bersama ibu Siti Fatimah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Pucangsimo).

Beberapa kegiatan yang tidak terealisasi pada tahun 2021 padahal sudah dianggarkan seperti sosialisasi bidang hukum pada masyarakat, pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat desa diakibatkan karena adanya larangan berkerumun pada saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai respon pemerintah akibat dampak pandemi *Covid-19* (Wawancara bersama ibu Siti Fatimah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Pucangsimo).

Kinerja keuangan Desa Pucangsimo pada tahun 2020 dan 2021 ditinjau dari aspek efisiensi

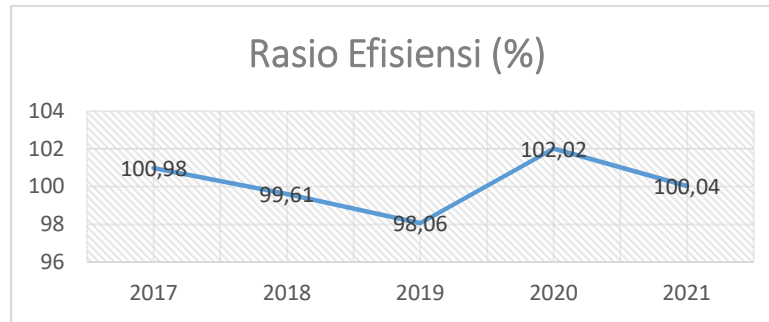
Tabel 6.
Hasil Pengukuran Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2017	1.537.334.705,74	1.522.356.454,66	100,98	Tidak Efisien
2018	1.964.684.380,00	1.972.316.926,00	99,61	Efisien
2019	2.098.962.400,00	2.140.426.827,00	98,06	Efisien
2020	2.293.733.897,06	2.248.312.892,27	102,02	Tidak Efisien
2021	3.061.287.529,00	3.059.764.156,00	100,04	Tidak Efisien

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan tabel 1.6 terlihat bahwa kinerja keuangan Desa Pucangsimo ditinjau dari segi efisiensi pada tahun 2017, 2020, dan 2021 menunjukkan rasio diatas 100%, artinya berada pada kategori Tidak Efisien. Sedangkan pada tahun 2018 dan 2019 menunjukkan rasio dibawah 100% artinya berada pada kategori Efisien. Dimana hasil rasio pada tahun 2017 sebesar 100,98%, tahun 2018 sebesar 99,61%, tahun 2019 sebesar 98,06%, tahun 2020 sebesar 102,02%, dan tahun 2021 sebesar 100,04%.

Jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka hasil perhitungan kinerja keuangan pada APBDes Desa Pucangsimo ditinjau dari segi efisiensi adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Rasio Efisiensi Desa Pucangsimo Tahun 2017-2021

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa kinerja keuangan Desa Pucangsimo mulai tahun 2017 sampai 2021 mengalami fluktuasi. Grafik rasio efisiensi mulai tahun 2017 sampai 2019 menunjukkan penurunan, artinya Desa Pucangsimo semakin baik dalam mengendalikan kegiatan belanja. Namun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami kenaikan hingga mencapai kategori Tidak Efisien walaupun pada tahun 2021 menunjukkan penurunan.

Kinerja keuangan Desa Pucangsimo pada tahun 2020 dan 2021 ditinjau dari aspek efektivitas

Tabel 7.
Hasil Pengukuran Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Anggaran Pendapatan (Rp)	Rasio (%)	Kriteria
2017	1.522.356.454,66	1.520.279.834,05	100,13	Efektif
2018	1.972.316.926,00	1.967.640.000,00	100,23	Efektif
2019	2.140.426.827,00	2.138.776.000,00	100,07	Efektif
2020	2.248.312.892,27	2.599.410.000,00	86,49	Cukup Efektif
2021	3.059.764.156,00	3.059.954.000,00	99,99	Cukup Efektif

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan tabel 1.7 terlihat bahwa kinerja keuangan Desa Pucangsimo ditinjau dari segi efektivitas pada tahun 2017, 2018, dan 2019 menunjukkan rasio diatas 100%, artinya berada pada kategori Efektif. Sedangkan pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan rasio antara 85% - 99% artinya berada pada kategori Cukup Efisien. Dimana hasil rasio pada tahun 2017 sebesar 100,13%, tahun 2018 sebesar 100,23%, tahun 2019 sebesar 100,07%, tahun 2020 sebesar 86,49%, dan tahun 2021 sebesar 99,99%.

Jika digambarkan dalam bentuk grafik, maka hasil perhitungan kinerja keuangan pada APBDes Desa Pucangsimo ditinjau dari segi efektivitas adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Rasio efektivitas Desa Pucangsimo Tahun 2017-2021

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan gambar 1 terlihat bahwa kinerja keuangan Desa Pucangsimo mulai tahun 2017 sampai 2021 mengalami fluktuasi. Grafik rasio efektivitas pada tahun 2019 dan 2020 menunjukkan penurunan. Pendapatan pada tahun 2020 sebesar 350.000.000,00 yang bersumber dari bantuan keuangan khusus untuk sarana dan prasarana untuk pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dari kabupaten tidak masuk rekening desa karena adanya perubahan anggaran dari pihak kabupaten yang diakibatkan karena pandemi *Covid-19* sehingga Desa Pucangsimo tidak merealisasikan kegiatan pembangunan tersebut, kemudian pada tahun 2021 pendapatan asli desa dari BUMDes yang bergerak pada sektor pertanian melon tidak memenuhi target karena mengalami gagal panen akibat cuaca tidak stabil (Wawancara bersama Ibu Siti Fatimah selaku Kepala Urusan Keuangan Desa Pucangsimo).

PEMBAHASAN

Tingkat Ekonomi

Hasil analisis peneliti terkait fluktuasi nilai rasio ekonomis Desa Pucangsimo terjadi akibat anggaran belanja tidak hanya dialokasikan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, namun juga dialokasikan untuk penanggulangan pandemi *Covid-19* seperti penyediaan kotak obat, penyemprotan disinfektan, dan penyaluran BLT untuk membantu perekonomian masyarakat yang

terdampak pandemic *Covid-19*. Selain itu, tidak terealisasinya beberapa kegiatan juga mempengaruhi jumlah realisasi belanja sehingga anggaran belanja lebih tinggi dari pada realisasi anggaran belanja.

Hasil ini mendukung tingkat ekonomi yang disebutkan oleh Mahmudi (2016) yang menyebutkan bahwa suatu kinerja organisasi sector publik dapat dikatakan ekonomis ketika realisasi belanja lebih kecil daripada anggaran belanja. Sedangkan Mahsun (2013) mengatakan apabila sumber daya yang dikeluarkan berada di bawah anggaran maka terjadi penghematan, sedangkan sebaliknya, apabila diatas anggaran maka terjadi pemborosan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian (Bayuwono et al., 2022), dimana pemerintah Desa Keputran mampu menekan realisasi belanja walaupun anggaran tidak hanya digunakan untuk memenuhi berbagai bidang melainkan juga dialokasikan untuk penanggulangan pandemi *Covid-19*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh (Maryanti & Munandar, 2021) pada Pemkot Surabaya dimana kinerja keuangannya masih belum stabil dalam mempertahankan tingkat ekonomisnya sehingga kurang melaksanakan penghematan pada anggaran belanja.

Tingkat Efisiensi

Realisasi belanja pada tahun 2017, 2020, dan 2021 lebih banyak karena Desa Pucangsimo memiliki SiLPA dari tahun anggaran sebelumnya, jadi SiLPA tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan belanja pada tahun anggaran selanjutnya, kemudian pada tahun 2019 memang ada kegiatan inovasi Desa Pucangsimo yang tidak terealisasi yaitu pembuatan kerambah ikan yang dianggarkan senilai Rp. 30.000.000,00 karena lembaga KPMD belum siap dan tempatnya belum memadai. Kegiatan belanja pada tahun 2020 lebih banyak dialokasikan untuk kegiatan penanggulangan *Covid-19*, penyaluran BLT, penyemprotan disinfektan serta pembangunan drainase, jembatan, paving, renovasi pendopo, dan RTLH di 9 titik. Kemudian Peningkatan belanja pada tahun 2021 diakibatkan pada saat Pandemi Covid-19 anggaran belanja tidak dialokasikan pada bidang kesehatan saja melainkan pada bidang pembangunan fisik seperti pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) sebanyak 5 titik, pembangunan jalan paving sebanyak 3 titik, pembangunan 1 unit Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan Penerangan Jalan Umum di

109 titik, pembangunan sumur resapan sebanyak 10 unit, dan pembangunan MCK sebanyak 26 unit, kegiatan normalisasi di Dsn Pucanganom dan Dsn Simo namun hanya terealisasi sebesar 82% yaitu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 37.211.280,00 dan terealisasi sebesar Rp. 30.656.280,00. Selain itu pada tahun 2021 PAD dari kegiatan BUMDes yang bergerak pada sektor pertanian melon tidak memenuhi target karena mengalami gagal panen akibat cuaca tidak stabil.

Mahsun (2013) mengatakan bahwa kinerja keuangan organisasi sector publik dikatakan efisien ketika realisasi pendapatan lebih tinggi dari realisasi belanja. Pada hasil pengukuran kinerja keuangan Desa Pucangsimo diketahui bahwa pada tahun 2020 dan 2021 selain anggaran dialokasikan untuk penanggulangan pandemic *Covid-19*, Desa Pucangsimo juga melaksanakan beberapa pembangunan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Seran (2021), dimana kinerja keuangan Desa Subun Bestobe belum mampu menekan penggunaan anggaran pembangunan.

Tingkat Efektivitas

Mahmudi (2016) mengatakan ukuran kesuksesan organisasi, program, atau aktivitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Sedangkan Mahsun (2013) mengatakan bahwa efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Dari hasil analisis yang didapatkan dapat dikatakan bahwa Desa Pucangsimo sudah efektif dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau program dalam rangka mencapai tujuan organisasi walaupun pada tahun 2020 dan 2021 berada pada kategori cukup efektif akibat ada beberapa kegiatan yang tidak dapat direalisasikan karena pandemi *Covid-19*. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Magfiroh et al., 2021) Dimana kinerja keuangan Desa Parengan ditinjau dari aspek efektivitas pada tahun 2016-2018 cenderung meningkat walaupun rata-rata masih dalam kategori Cukup Efektif.

SIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini sebagai berikut; 1) Kinerja keuangan pada APBDes Desa Pucangsimo mulai tahun anggaran 2017 sampai 2021 yang diukur menggunakan rasio ekonomis secara konsisten menunjukkan hasil pada kategori ekonomis walaupun pada

tahun 2021 mengalami penurunan. Artinya pemerintah Desa Pucangsimo sudah sehemat mungkin dalam mengelola keuangan sehingga dapat meminimalisir penggunaan anggaran belanja dan menghindari belanja yang tidak penting; 2) Kinerja keuangan Desa Pucangsimo yang diukur menggunakan rasio efisiensi pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan hasil tidak efisien. Tingginya realisasi belanja pada tahun 2020 terjadi akibat adanya SiLPA dan tidak hanya dialokasikan untuk membiayai bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, namun juga dialokasikan pada kegiatan penanggulangan Covid 19, dan pembangunan akibat dampak bencana banjir yang melanda Desa Pucangsimo pada tahun 2021; 3) Rasio efektivitas pada tahun 2020 dan 2021 menunjukkan hasil Cukup Efektif. Artinya pemerintah Desa Pucangsimo mampu memanfaatkan sebagian sumber daya yang dimiliki untuk melaksanakan kegiatan sesuai yang telah direncanakan dalam APBDes Desa Pucangsimo guna mencapai tujuan yang diharapkan walaupun beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat pandemi *Covid-19*.

DAFTAR PUSTAKA

- Anfujatin, A. (2016). Analisis faktor-Faktor yang Menyebabkan Rendahnya Penyerapan Anggaran Belanja Pada SKPD Kabupaten Tuban. *DIA: Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 1–18. <https://doi.org/10.30996/dia.v14i01.1014>.
- Bayuwono, V. B., Sinaga, I., & Palma, V. A. (2022). Analisa transparansi APBDdes sebelum dan saat pandemi. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 80–88. <https://doi.org/10.38204/jrak.v8i1.678>.
- Magfiroh, N., Rosyafah, S., & Lestari, T. (2021). Analisis Penerapan Pengukuran Value For money pada APBDes dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintahan Desa (Studi Kasus pada Desa Parengan Kecamatan Jetis Kabupaten Mookerto. *UAJ : UBHARA Accounting Journal*, 1(1), 58–64. <http://journal.febubhara-sby.org/uaj>.
- Mahdita, S. C. M., Riharjo, I. B., & Ardini, L. (2021). Melihat Perspektif Kinerja dengan Value for Money. *JRAAM: Jurnal Riset Dan Aplikasi Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 159–174. <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.003>.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Ketiga). UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2013). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Pertama). BPFE-Yogyakarta.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik* (Mutmainnah (ed.); 1st ed.). Pusaka Almailda. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17090/1/akuntansii.pdf>.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik* (Pertama). ANDI.
- Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2021). Analisis Value For Money Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun Anggaran 2015-2019.

- JIMEA: Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 5(3), 2886–2899. <https://doi.org/10.31955/mea.vol5.iss3.pp2886-2899>.
- Munti, F., & Fahlevi, H. (2017). Determinan Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa : Studi pada Kecamatan Gandapura Kabupaten Bireuen Aceh. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 18(2), 172–182. <https://doi.org/10.18196/jai.180281>.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode penelitian kualitatif* (1st ed.). LP2M UPN "Veteran" Yogyakarta Press.
- Nanda, R., & Darwanis. (2016). Analisis Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif Pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan). *JIMEKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 1(1), 327–340. <http://jim.unsyiah.ac.id/EKA/article/view/778>.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 120 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 195/PMK.05/2018 tentang monitoring dan Evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L, 65 (2018). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5501>.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, 1 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/151181/permendes-pdtt-no-13-tahun-2020>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, 184 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103888/pp-no-12-tahun-2019>.
- Prihatiningsih, A., Rachmad, & Syamsuddin. (2013). Defisit Anggaran dan Implikasinya terhadap Perkembangan Ekonomi dan Kinerja Keuangan Kabupaten Tebo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 1(2), 97–108. <https://doi.org/10.22437/ppd.v1i2.1499>.
- Putri, T. W. W., & Susliyanti, E. D. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pendekatan Value For Money (Studi Pada Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Jambidan Tahun Anggaran 2014 – 2016). *Jurnal Solusi*, 14(1), 85–102.
- Rosmawati, S. (2021). Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2015-2019. *Citra Ekonomi*, 2(1), 43–51. <http://www.jurnal-citra-ekonomi.com/index.php/jurnalci/article/view/66>.
- Seran, M. S. B. (2021). Value For Money : Suatu Analisis Pengaruh Kinerja Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Subun Bestobe. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(1), 94–101. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/1610/817>.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, 103 (2014). https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf.